

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa globalisasi yang sedang berlangsung, pertukaran merupakan sesuatu yang harus dilakukan suatu negara untuk menggerakkan perekonomiannya sendiri, baik pertukaran skala kecil maupun skala besar. Pertumbuhan ekonomi ini secara langsung mempengaruhi peluang bisnis yang semakin luas, dan itu berarti bahwa peran pedagang besar dan kecil mendukung pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Kementrian PPN/Bappenas, 2023). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dalam perkembangan dan penguatan perekonomian suatu negara (Rachmawati dkk, 2019). Usaha mikro, kecil, dan menengah juga berperan besar dalam membuka dan mengembangkan posisi bagi individu yang memiliki pelatihan dan kemampuan rendah. Selain itu, saat ini banyak bermunculan organisasi-organisasi kecil, menengah dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang sangat ampuh untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia (Rahayu, 2017).

Pengertian UMKM dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 adalah suatu organisasi kecil yang dimiliki dan diawasi oleh perseorangan atau dimiliki oleh suatu perkumpulan kecil dengan ukuran kekayaan dan gaji tertentu. UMKM memainkan peran penting dalam perkembangan keuangan dan mendorong

pertumbuhan moneter Indonesia. Kehadiran kawasan UMKM membuka peluang kerja agar mampu mengekang kemiskinan (Dewi, 2018).



Gambar 1.1 Jumlah UMKM Indonesia (2015 – 2019)

Berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 64,19 juta unit. Jumlah ini mencakup 99,99% dari seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, organisasi dengan cakupan yang sangat besar hanya menambahkan hingga 5.637 unit atau setara dengan 0,01%. Secara keseluruhan, betapapun banyaknya sebanyak 64,6 juta unit mungkin merupakan organisasi mini. Jumlah tersebut sebanding dengan 98,67% total UMKM seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha mandiri. Luasnya 1,22% dari total UMKM yang ada di Tanah Air. Sementara organisasi menengah hanya memiliki 65.465 unit. Jumlah ini menambah 0,1% dari total UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan andalan utama dalam perkembangan perekonomian Indonesia, terus didorong untuk naik kelas, dengan tujuan agar mereka dapat membuat komitmen yang lebih penting terhadap perekonomian dan mempertahankan lebih banyak spesialis. Bidang UMKM menambah PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun, padahal komitmen UMKM terhadap retensi kerja mencapai

97% dari total angkatan kerja. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM, yang mewakili sebagian besar dari seluruh unit khusus.

Otoritas publik telah memberikan berbagai jenis dukungan, mulai dari tingkat usaha ultra mini hingga usaha menengah. Kredit Usaha Perorangan (KUR) merupakan salah satu jenis dukungan pendanaan UMKM dengan bunga ringan dan syarat sederhana. Selain itu, dukungan superminiatur juga dilakukan melalui subsidi mulai dari APBN dan dana berputar serta pendanaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pencapaian finansial Indonesia selama ini tentunya berkat bantuan dan perhatian semua pihak, termasuk para akademisi. Menko Airlangga meyakini buku yang diedarkan ini akan menambah informasi bagi para akademisi dan pembuat strategi dalam mencermati dan menilai berbagai rencana/program pemerintah, khususnya yang masuk di lingkungan UMKM. (Kemenko Perekonomian, 2023)

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Jakpreneur 2019-2023

Kota Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jakarta Pusat	12.618	17.658	20.423	9.417	4.549
Jakarta Utara	13.543	18.571	15.755	6.839	4.132
Jakarta Barat	11.335	23.010	20.642	11.043	5.213
Jakarta Selatan	11.825	23.355	25.944	12.669	6.478
Jakarta Timur	14.829	24.982	25.751	12.970	7.924
Kepulauan Seribu	1.364	2.347	769	405	221
Total	65.514	109.923	109.284	53.343	28.517

Pada penelitian ini, para peneliti memanfaatkan UMKM yang dikoordinasikan dengan Jakpreneur sebagai objek eksplorasi. Jakpreneur merupakan wadah penciptaan, pendampingan, dan upaya terkoordinasi untuk pengembangan UMKM melalui lingkungan yang inovatif, seperti pendirian perusahaan baru, lembaga pendidikan, dan lembaga pendanaan. Jakpreneur

dapat berupa upaya jangka panjang yang terkoordinasi atau berbagai jenis kegiatan, yang berpotensi menumbuhkan kemampuan dan kemandirian dunia usaha, melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, yayasan, serta berbagai pihak. Tabel di atas merupakan jumlah individu Jakpreneur selama 5 tahun terakhir.

Program Jakpreneur merupakan inisiatif umum yang didukung oleh wajib pajak DKI Jakarta untuk memungkinkan UMKM kuliner di bidang keuangan dapat menggarap perekonomian lokal. Program Jakpreneur ini dimaksudkan untuk membantu melibatkan dan membantu UMKM agar berdaya dan siap berkarya di organisasinya. Program Jakpreneur merupakan program pembinaan UMKM di wilayah ibu kota. Program Jakpreneur merupakan wadah kreasi, bantuan dan kerjasama yang diharapkan Pemerintah Bersama DKI Jakarta dapat menumbuhkan potensi usaha yang berkemampuan dan kemandirian. (Hendro & Arlinda, 2020).

Penelitian Hakim et al (2021) yang membahas diselenggarakannya program Jakpreneur dengan tujuan untuk lebih mengembangkan perekonomian UMKM di masa virus Corona di Wilayah Tanjung Priok, hal ini cenderung beralasan bahwa penyempurnaan program Jakpreneur telah dilakukan dengan sangat baik oleh Pemerintahan Umum DKI melalui SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta.

Tabel 1.1 Perkembangan Program Jakpreneur 2021 Kec Tj. Priok

Kecamatan Tj. Priok	Realisasi	Target	Persentase
Pendaftaran	1870	2149	87%
Pelatihan	1582	2240	71%
Pemasaran	115	101	114%
Pelaporan Keuangan	230	53	433%
Pendampingan	914	2046	45%
Perizinan	964	318	303%
Pemodalan	130	53	245%

Sumber: Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok

Melihat tabel di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kemajuan yang sangat pesat dalam penyajian UMKM. Ada 1870 pendaftaran atau tingkat 87%. Apalagi tingkat kesiapannya sudah 71%, khusus untuk bimbingan belajar masih belum cukup karena baru mencapai 45%, namun kemajuan pasti terus dilakukan oleh Jakpreneur Daerah Tanjung Piok di tengah kendala akibat pandemi virus Corona. , terdapat pada level showcase sebesar 114%, perintis moneter 433%, perizinan 303% dan modal 245% yang melampaui target.

Perusahaan kecil dan swasta telah menunjukkan perannya dalam perekonomian masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah perusahaan masih sering menghadapi berbagai kendala dalam perkembangannya, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah terbatasnya modal kerja, kendala dalam inovasi, kreasi, mempromosikan dan membatasi sifat SDM-nya (Anggraeni, 2015). Hal ini akan mempengaruhi eksekusi, jika pelaku bisnis tidak dapat mengelola dana dengan baik.

Persentase perusahaan swasta kecil di Indonesia pada umumnya masih rendah, sehingga perusahaan kecil dan swasta tidak mampu bersaing dan berkembang dengan baik (Sanistasya dkk., 2019). Oleh karena itu, diharapkan upaya untuk menggarap presentasi perusahaan miniatur dan swasta. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan dan informasi kepada para pelaku bisnis mengenai pendidikan keuangan, sehingga para pelaku bisnis dapat lebih fokus pada cara yang paling efisien untuk mengelola dananya dengan lebih baik (Aribawa, 2016). Hal ini harus dilakukan, jika kurangnya pemahaman mengenai informasi keuangan, mengambil keputusan dalam hal keuangan tidak akan terlalu baik untuk mencapai tujuan sebuah bisnis.

Literasi keuangan merupakan keahlian individu dalam mengatur, mengawasi dan membedah dana suatu usaha yang dapat mempengaruhi bantuan pemerintahnya. (Lusardi, 2008). Selain itu, literasi keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dan kemampuan seorang individu mengenai pengelolaan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan

keuangan saat ini dan masa depan agar dapat hidup lebih baik di masa yang akan datang (Rahayu, 2017). Jadi, jika pelaku bisnis skala kecil dan mandiri dapat memahami informasi keuangan dengan baik, maka mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan dana usahanya. Maka dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan moneter lebih tinggi, para pelaku bisnis akan lebih baik dalam berurusan dengan organisasi moneter mereka.

Selain itu Inklusi Keuangan termasuk dalam program Literasi Keuangan terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan (Terzi, 2015:269-276). Menurutnya, semakin tinggi peningkatan Pertimbangan Moneter pada UKM, pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan moneter suatu negara. Pertimbangan Moneter berdampak besar pada mentalitas investor dalam cara mereka memandang keuntungan dan uang. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Teknologi Keuangan pada dasarnya mempunyai kaitan yang sangat erat dalam penguatan konsumen, yang dimaksud dengan hubungan disini adalah hubungan yang bersesuaian secara langsung dalam meningkatkan kemampuan seseorang dan berpikir dalam menentukan produk dan pelayanan. Faktor utama yang menentukan perkembangan UMKM adalah terkait dengan penerimaan dana dan tentu saja administrasi moneter.

Literasi Keuangan akan mempersiapkan UMKM untuk mengukur pilihan mereka dalam mencari dukungan untuk memajukan desain moneter mereka. Selain itu, UMKM dengan tingkat Literasi Keuangan yang rendah umumnya akan kesulitan mengambil keputusan mengenai sumber pendanaan. UMKM yang tidak memiliki catatan keuangan yang sempurna atau tidak memiliki laporan keuangan yang jelas akan menyulitkan bank dan pendukung keuangan untuk mensurvei pertaruhan bisnis. Untuk meningkatkan jumlah UMKM, Bidang Industri dan Perdagangan memerlukan arahan bagaimana mengetahui Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Teknologi Keuangan.

Masalah dari Teknologi Keuangan dimana masih kurang mempunya pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangannya, namun dari segi literasi yang dimiliki masih cenderung kurang dalam pengelolaan keuangannya. Melalui Financial Inclusion dalam mempertimbangkan masih relatif kurang dimana pelaku UMKM masih belum mampu mencari solusi yang tepat dalam menghadapi kondisi keuangannya.

Penelitian yang dilakukan Sanistasya (2019) dan Ye (2019) pengukuran literasi keuangan menggunakan indikator pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan keuangan. Penelitian Yanti (2019) pengukuran literasi keuangan menggunakan indikator tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi. Penelitian yang dilakukan Widiyati (2018) variabel literasi keuangan menggunakan indikator pengetahuan, perilaku dan sikap keuangan. Sedangkan dalam penelitian Eniola dan Entebang (2016) literasi keuangan menggunakan indikator pengetahuan, sikap dan kesadaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2019) pengukuran inklusi keuangan menggunakan indikator akses, kualitas, pemakaian dan kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan Riwayati (2017) variabel inklusi keuangan menggunakan indikator *mobile banking*, *banking service*, dan *banking penetration*. Sedangkan dalam penelitian Bongomin (2017) pengukuran inklusi keuangan menggunakan indikator akses dan kesejahteraan.

Meskipun penelitian mengenai Literasi Keuangan, Inklusi keuangan, dan Teknologi Keuangan sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum banyak penelitian yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat terhadap pelaku UMKM yang menjadi acuan untuk meneliti masalah yang terjadi.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, peneliti tertarik serta merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat melihat, mempelajari serta memahami terkait **“Pengaruh Literasi, Inklusi dan Teknologi Keuangan**

Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Provinsi DKI Jakarta)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa pertanyaan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh teknologi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi keuangan terhadap kinerja UMKM di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan secara akademis bagi mahasiswa, dosen, dan pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga saran bagi dan pelaku Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar meningkatkan pengetahuan mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan.